



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR : 153 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 156 TAHUN 2025
TENTANG DAFTAR DATA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kebutuhan data yang valid dan akuntabel, maka perlu mengatur penyelenggaraan Tata Kelola Data Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, instansi Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dan dalam menyusun daftar data, instansi daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 156 Tahun 2025 tentang Daftar Data Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah;
15. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
16. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 07727/D.03/PP.02.01/05/2025, Hal: Penyampaian Informasi Mengenai Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2025-2030 tanggal 20 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 156 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR DATA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Daftar Data Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan salah satu pedoman dan kebutuhan Perangkat Daerah Tahun 2025;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARSAL ARAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : 153 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 Juni 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 156 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR DATA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR DATA LINGKUP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025							
NO	DAFTAR DATA	DASAR RUJUKAN	JADWAL PEMUKTAHIRAN DATA	JADWAL RILIS	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KETERANGAN
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
A.	Urusan Pendidikan						
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	RKPD/SPM	Tahunan		P	P	
2	Angka Melek Huruf Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	Permendagri 86/ 2017, RKPD	Tahunan		P	P	
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten	Permendagri 86/ 2017, RKPD	Tahunan		P	P	
4	Harapan Lama Sekolah	Permendagri 86/ 2017, RKPD	Tahunan		P	P	
5		TPB/SDGs, Permendagri 86/2017	Tahunan		-	P	

6	Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
7	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	Permendagri 18/ 20, SPM, SDGS	Triwulananan		p	P	
8	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Permendagri 18/ 20, SPM, SDGS	Triwulananan		p	P	
9	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan	Permendagri 86/2017	Tahunan		p	P	
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Permendagri 86/2017, Tujuan Pembangunan, RKP	Tahunan		p	P	
11	Angka Partisipasi Murni (APM):	TPB/SDGs/Permendagri 86/2017	Tahunan		p	P	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	TPB/SDGs/Permendagri 86/2017	Tahunan		p	P	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	TPB/SDGs/Permendagri 86/2017	Tahunan		p	P	
12	Angka Partisipasi Kasar (APK):	TPB/SDGs/Permendagri 86/2017	Tahunan		p	P	
	Angka Partisipasi Sekolah (APK) SD/MI/Paket A	TPB/SDGs/Permendagri 86/2017	Tahunan		p	P	
	Angka Partisipasi Sekolah (APK)	TPB/SDGs/Permendagri	Tahunan		p	P	

	SMP/MTs/Paket B	86/2017					
13	Angka Putus Sekolah (APTS):	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	P	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	P	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	P	
14	Angka Kelulusan (AL):	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	P	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	P	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	P	
15	Angka Melanjutkan (AM):	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	P	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	P	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
	Proporsi penduduk berusia >15 tahun yang melanjutkan ke tingkat SMA	RPJPD,RPJMD,RKPD	Tahunan		-	P	
16	Jumlah Guru Dikmen yang Megikuti Sertifikasi Guru	sipd.go.id	Tahunan		-	-	
17	Jumlah Penataan Guru Dikmen	sipd.go.id	Tahunan		-	-	
18	Jumlah Guru SD/MI	sipd.go.id	Tahunan		-	-	
19	Jumlah Guru SMP/MTs	sipd.go.id	Tahunan		-	-	
20	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	

	Pendidikan Dasar						
21	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
22	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi SI/D -IV	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
23	Angka literasi membaca SD	RPJPD,RPJMD,RKPD	Tahunan		p	p	
24	Angka Literasi membaca SMP	RPJPD,RPJMD,RKPD	Tahunan		p	p	
25	Angka numerasi SD	RPJPD,RPJMD,RKPD	Tahunan		p	p	
26	Angka Numerasi SMP	RPJPD,RPJMD,RKPD	Tahunan		p	p	
27	Angka Pengetahuan Sains	RPJPD,RPJMD,RKPD	Tahunan		p	p	
Fasilitas Pendidikan:					-	-	
1	Jumlah Sekolah PAUD	sipd.go.id	Tahunan		-	-	
2	Jumlah Sekolah SD/MI	sipd.go.id	Tahunan		-	-	
3	Jumlah Sekolah SMP/Mts	sipd.go.id	Tahunan		-	-	
4	Persentase Sekolah PAUD Kondisi Bangunan Baik	sipd.go.id	Tahunan		-	-	
5	Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
6	Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
7	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	

	Usia Sekolah Pendidikan Dasar						
8	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
B.	Urusan Kebudayaan				-	-	
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	p	
2	Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan			p	
3	Persentase Bahasa dan Sastra yang Didokumentasikan dan Dikembangkan	RKPD	Tahunan		-	p	
4	Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan	RKPD	Tahunan		-	-	
5	Persentase Kesenian Tradisional Daerah yang Didokumentasikan dan Dikembangkan	RKPD	Tahunan		-	-	
6	Persentase Penduduk yang Memiliki Sumber Penghasilan Sebagai Pelaku/Pendukung Kegiatan Seni	RKPD	Tahunan		-	-	
7	Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan Upacara Adat	RKPD	Tahunan		-	-	
8	Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah	RKPD	Tahunan		-	-	

9	Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni	RKPD	Tahunan		-	-	
10	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	RKPD	Tahunan		-	-	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Kawasan Cagar Budaya 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
2	Peta Kawasan Lokasi Cagar Budaya skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
3	Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan PAUD, SD/MI,SMP/MTs skla 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
1.	DINAS KESEHATAN						
1	Persentase Capaian SPM Kesehatan	SPM/RKPD	Tahunan		p	p	
2	Angka Harapan Hidup	Permendagri 86/2017, RKPD, RPJMD, RPJPD	Tahunan		p	p	
3	Persentase Balita Gizi Kurang	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		p	p	
4	Prevalensi Stunting	Permendagri 86/2017, RKPD, RPJMD, RPJPD	Tahunan		p	p	
5	Jumlah Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Permendagri 86/2017, RKPD, RPJMD, RPJPD	Tahunan		p	p	
6	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		p	p	
7	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		p	p	
8	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		p	p	
9	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Tersedia	Permendagri 86/2017, RKPD, RPJMD, RPJPD	Tahunan		p	p	

10	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Profesi	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
11	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
12	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
13	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
14	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
15	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
16	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kabupaten	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
17	Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	p	
18	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap dan Jenis Kelamin	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	p	
19	Cakupan Kompilasi Kebidanan yang Ditangani	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
20	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
21	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	p	
22	Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
23	Jumlah Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP)/Non Polio	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
24	Jumlah Warga Negara pada kondisi	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	

	kejadian luar biasa Kabupaten yang mendapatkan layanan kesehatan						
25	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
26	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Permendagri 86/2017, RKPD, RPJMD, RPJPD	Tahunan		p	p	
27	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	p	
28	Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
29	Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
30	Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	p	
31	Persentase Penerapan GERMAS Di Kabupaten	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	p	
32	Jumlah Kasus Penyakit berdasarkan Jenisnya	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
33	Angka Kejadian Malaria (Per 100.000 Penduduk)	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
34	Tingkat Kematian Akibat Malaria (Per 1000 Penduduk)	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
35	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	p	
36	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
37	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	p	
38	Jumlah Kasus Diare Yang Dilayani di	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	

	Kabupaten						
39	Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
40	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	p	
41	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Diabetes Melitus	SPM, RKPD	Tahunan		-	p	
42	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Hipertensi	SPM,RKPD	Tahunan		-	p	
43	Cakupan Penanganan Usia Lanjut	SPM, RKPD	Tahunan		-	p	
44	Cakupan Penanganan Penderita Gangguan Berat	SPM, RKPD	Tahunan		-	p	
45	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
46	Cakupan Kunjungan Bayi	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
47	Cakupan Pelayanan Nifas	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
48	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
49	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
50	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Anak Usia 6-24 bulan Keluarga Miskin	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
51	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
52	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Permendagri 86/2017, RKPD	Tahunan		-	-	
53	Penyebab Kematian berdasarkan penyakit (Menular dan Tidak Menular)	RKPD	Tahunan		-	-	
54	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	SPM,TPB	Tahunan		-	-	
55	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Permendagri 86/2017,TPB	Tahunan		-	p	
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	Permendagri 86/2017, RKPD, RPJMD, RPJPD	Tahunan		p	p	

	angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	Permendagri 86/2017, RKPD, RPJMD, RPJPD	Tahunan		p	p	
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						
1	Indikator Pelayanan Rumah Sakit (BOR, ALOS, BTO, TOI, NDR, GDR, Rata-rata Kunjungan Per Hari di RSUD Kabupaten	PERMENKES NOMOR1171/MENKES/PER /VI/2011,SIRS ONLINE	Triwulananan		-	-	
2	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap Menurut Jenis Pembayaran di RSUD Kabupaten	PERMENKES NOMOR1171/MENKES/PER /VI/2011,SIRS ONLINE	Triwulananan		-	-	
3	10 Besar Penyakit Rawat Jalan di RSUD Kabupaten	PERMENKES NOMOR1171/MENKES/PER /VI/2011,SIRS ONLINE	Triwulananan		-	-	
4	10 Besar Penyakit Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin di RSUD Kabupaten	PERMENKES NOMOR1171/MENKES/PER /VI/2011,SIRS ONLINE	Triwulananan		-	-	
5	Jumlah Fasilitas Tempat Tidur Rawat Inap di RSUD	PERMENKES NOMOR1171/MENKES/PER /VI/2011,SIRS ONLINE	Triwulananan		-	-	
6	Nilai Akreditasi RSUD	PERMENKES NOMOR 01/12/2020 PP 47 TAHUN 2021	Tahunan		-	-	
7	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit	PERMENKES NOMOR1171/MENKES/PER /VI/2011,SIRS ONLINE	Tahunan		-	-	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	SPM Rumah Sakit	Tahunan		-	p	
9	Capaian Mutu Kinerja Pelayanan Rawat Inap	PERMENKES 30/2022	Triwulananan		-	-	
10	Capaian Kelas RS	PP 47 TAHUN 2021	Tahunan		-	-	
11	Persentase Sarana Prasarana dan Sediaan Farmasi yang Sesuai Ketentuan	RKPD,PERMENKES 31/2018	Tahunan		-	-	

12	Persentase Penerapan SIMRS	PERMENKES 24/2022	Tahunan		-	-	
13	Persentase Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan yang Terlatih Minimal 20 Jam Setahun	SPM Rumah Sakit	Semester		-	-	
14	Klasifikasi Penyakit yang diderita pasien rawat jalan	-	Triwulananan		-	-	
15	Klasifikasi Penyakit yang diderita pasien rawat inap	-	Triwulananan		-	-	
16	Klasifikasi Penyakit penyebab kematian pasien	-	Triwulananan		-	-	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Persentase Capaian SPM PUPR	RKPD, RPD, SPM	Tahunan		p	p	
2	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Administrasi Pemerintahan di Kabupaten	RKPD, RPD	Tahunan		-	-	
3	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Administrasi Pemerintahan di Kabupaten (Km)	RKPD, RPD	Tahunan		-	-	
4	Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Jembatan dan Administrasi Pemerintahan di Kabupaten (Unit)	RKPD, RPD	Tahunan		-	-	
5	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli di Kabupaten (Orang)	RKPD, RPD	Tahunan		-	-	
6	Kondisi Jaringan Irigasi (Primer, Sekunder dan Tersier)	RKPD, RPD	Tahunan		-	-	
7	Luas Daerah Irigasi sesuai PERMEN (ha)	RKPD, RPD	Tahunan		-	-	
8	Luas Daerah Irigasi sesuai sawah/fungsional (ha)	RKPD, RPD	Tahunan		-	-	

9	Jumlah Bangunan Irigasi di Kabupaten (Unit)	RKPD, RPD	Tahunan		-	-	
10	Persentase Rumah Tangga Berasaniitasi Layak	SPM,RKPD	Tahunan		p	p	
11	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Berkualitas	SPM,RKPD	Tahunan		p	p	
12	Kapasitas Air Baku (dihitung dari daya SimSPAM)	RPJPD, RPJMD	Tahunan			p	
13	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung	RKPD 2023	Tahunan		-	-	
14	Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungannya	RKPD 2023	Tahunan		-	p	
15	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	RKPD 2023	Tahunan		-	p	
16	Persentase Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	RKPD,RPD	Tahunan		-	p	
17	Data Jumlah TPS 3R	RPJMN, RKP	Tahunan		p	-	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Jalan Skala 1:5.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
2	Peta RTRW Kabupaten Skala 1:250.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
3	Peta RTRW Kabupaten Skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
4	Peta Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
5	Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAL) dan Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
6	Peta Sebaran Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
7	Peta Daerah Irigasi Permukaan Skala	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	

	1:5.000						
8	Peta Sebaran Lokasi Bendungan Eksisting dan Peta Sebaran Lokasi Bendungan Rencana Skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
1.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN						
1	Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni	Permendagri 86/2017	Tahunan		p	p	
4	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten	SDGs/TPB / Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
5	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
6	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Permendagri 86/2017	Tahunan		p	p	
7	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	SPM,Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
8	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
9	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak	SDGs/TPB	Tahunan		-	p	
10	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	SDGs/TPB	Tahunan		-	p	
11	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	SIPD-E.Database	Tahunan		-	-	
12	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki	TPB-SDGs	Tahunan		p	p	

	Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau						
13	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
14	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	RKPD	Tahunan		-	p	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Penggunaan dan Kepemilikan tanah (hak milik) skala 1:5.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
3	Peta Persebaran Permukiman Kumuh skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
1.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						
1	Persentase Capaian Keterpenuhan SPM	SPM, RKPD	Tahunan		p	p	
2	Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten (Orang)	RKPD	Tahunan		-	-	
3	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
4	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3)	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum	RKPD	Tahunan		-	-	
6	Persentase Penegakan PERDA	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	P	
7	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Permendagri 121/2018, Permendagri 59/2021	Tahunan		-	p	
8	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
9	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
10	Jumlah Pemenuhan PPNS di Satpol PP	Permendagri 3/2019	Tahunan		-	-	

	sesuai Rasio						
11	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Kabupaten	Permendagri 59/2021	Tahunan		-	P	
1.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	Jumlah Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Menurut Jenis Bencana di Kabupaten	TPB/SDGs/UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	Triwulanan		-	-	
2	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana dan Kabupaten di Kabupaten	Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012/Dokumen KRB	Tahunan		-	p	
3	Jumlah Korban Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten (Orang)	Permendagri 59/2021	Tahunan		-	p	
4	Jumlah Pengungsi Menurut Jenis Bencana di Kabupaten (Orang)	Permendagri 59/2021	Tahunan		-	p	
5	Jumlah Kerugian Material Menurut Jenis Bencana di Kabupaten (Rp/Juta)	Permendagri 59/2021	Tahunan		-	p	
6	Jumlah Prasarana dan Sarana Transportasi Tanggap Bencana	Peraturan BNPB Tahun 2011 dan Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2012	Tahunan		-	p	
7	Jumlah Sarana dan Prasarana Hunian Sementara Tanggap Bencana	Peraturan BNPB Tahun 2011 dan Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2012	Tahunan		-		
8	Persentase Penurunan Skor Risiko Bencana	Inarisk BNPB/Indeks Resiko Bencana	Tahunan		-		
9	Persentase Penanganan Pra Bencana	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
10	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
11	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
12	Jumlah Kejadian Bencana Alam	Peraturan BNPB Tahun 2011 dan Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2012	Tahunan		-	p	
13	Jumlah Kerusakan Rumah yang	Peraturan BNPB Tahun	Tahunan		-	p	

	diakibatkan Bencana Alam	2011 dan Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2012					
14	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Permendagri 59/2021	Tahunan		-	p	
15	Ketersediaan Peta Kawasan Resiko Bencana	Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012/Dokumen KRB	Tahunan		-	p	
16	Jumlah Fasilitas Rambu, Papan Informasi dan Jalur Evakuasi Pada Kawasan Rawan Bencana	Permendagri 59/2021	Tahunan		-	p	
17	Jumlah Petugas Kabupaten/Kota Dengan Indeks Risiko Bencana Tinggi Yang Terlatih Bidang Kebencanaan	Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008	Tahunan		-	p	
18	Ketersediaan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Terpadu dan Terlatih	Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008	Tahunan		-	-	
19	Jumlah Desa Tangguh Bencana Yang Dikembangkan (Desa)	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Tahunan		-	p	
20	Jumlah daerah yang menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (lokasi)	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Tahunan		-	p	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta kerentanan Likuifaksi skala 1:100.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
2	Peta Rawan Erosi skala 1 : 50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
3	Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Skala 1 : 250.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
4	Peta Rawan Banjir Skala 1 : 50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
5	Peta Rawan Banjir Bandang Skala 1 : 50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	

6	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Skala 1 : 50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
7	Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Skala 1 : 50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
8	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Skala 1 : 50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
9	Peta Rawan Gelombang ekstrim dan Abrasi 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
10	Peta Rawan Longsor 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
11	Peta Jalur Evakuasi Bencana 1: 5.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
1.	DINAS SOSIAL						
1	Jumlah Warga Negara Anak Telantar Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	SPM, RKPD			-	p	
2	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Telantar Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di Luar Panti	SPM, RKPD			-	p	
3	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	SPM, RKPD			-	p	
4	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	SPM, RKPD			-	p	
5	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Permendagri 86/ 2017			-	p	
6	Persentase PMKS yang Tertangani	Permendagri 86/ 2017			-	p	
7	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Permendagri 86/ 2017			-	p	
8	Persentase Panti Sosial Yang Menerima	Permendagri 86/ 2017			-	p	

	Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya						
9	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Permendagri 86/ 2017			-	p	
10	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Permendagri 86/ 2017			-	p	
11	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Permendagri 86/ 2017			-	p	
12	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Permendagri 86/ 2017			-	p	
13	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Permendagri 86/ 2017			-	p	
14	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (DTKS)	RKPD			-	p	
15	Jumlah Ketersediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	RKPD			-	-	
1.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
2	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
3	Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	UU.No.24 Thn 2013 Tentang	Semesteran		p	p	

	Nasional Berbasis NIK	Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk					
4	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		p	p	
5	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		p	p	
6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		p	p	
7	Jumlah Anak Usia 1 Tahun Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
8	Jumlah Penduduk Usia 4 - 6 Tahun dan Jenis Kelamin	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
9	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun Kabupaten dan Jenis Kelamin di Kabupaten	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
10	Jumlah Penduduk Usia 12 Tahun dan Jenis Kelamin di Kabupaten	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
11	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	UU.No.24 Thn 2013 Tentang	Semesteran		-	-	

	Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin	Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk					
12	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
13	Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
14	Jumlah Bayi Lahir Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
15	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kabupaten	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
16	Jumlah Kepemilikan KTP-el di Kabupaten	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		p	p	
17	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin, Jenis Kelamin di Kabupaten	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
18	Jumlah Penduduk Menurut Status Cerai, Jenis Kelamin di Kabupaten	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
19	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akte Kawin Menurut Jenis Kelamin di	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan	Semesteran		-	-	

	Kabupaten	UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk					
20	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akte Cerai Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
21	Jumlah Penduduk Yang Tamat Diploma IV/S1, S2 dan S3 Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
22	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
23	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
24	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin	UU.No.24 Thn 2013 Tentang Perubahan UU.No.23 Thn 2006 tentang Adminduk	Semesteran		-	-	
25	Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan	RKPD 2023	Semesteran		-	p	
26	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	RKPD 2023	Semesteran		-	p	
27	Persentase Kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	SIPD-E.Database	Semesteran		-	p	
1.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
A.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Jumlah Korban Kasus Kekerasan Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin di Kabupaten	Simfoni PPA	Tahunan		-	-	

2	Jumlah Korban Kasus Kekerasan Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin di Kabupaten	Simfoni PPA	Tahunan		-	-	
3	Jumlah Korban Kasus Kekerasan Menurut Pekerjaan, Jenis Kelamin di Kabupaten	Simfoni PPA	Tahunan		-	-	
4	Jumlah Korban Kasus Kekerasan Menurut Status Perkawinan, Jenis Kelamin	Simfoni PPA	Tahunan		-	-	
5	Jumlah Korban Kasus Kekerasan Difabel Menurut Jenis Kelamin	Simfoni PPA	Tahunan		-	-	
6	Jumlah Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten	Simfoni PPA	Tahunan		-	-	
7	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Kabupaten	Permendagri 86/2017, SDGs/TPB	Tahunan		-	-	
8	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten	Permendagri 86/2017, SDGs/TPB	Tahunan		-	-	
9	Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Permendagri 18 Tahun 2020	Tahunan		p	p	
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	RKP 2022	Tahunan		p	p	
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	RKP 2022	Tahunan		p	p	
12	Indeks Ketimpangan Gender	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		p	p	
13	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap Belanja Daerah	Permendagri 18 Tahun 2020	Tahunan		-	p	
14	Persentase Anak yang Memerlukan	Permendagri 18 Tahun	Tahunan		-	p	

	Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar	2020/RKPD					
15	Prevalensi Perkawinan Anak	RKPD	Tahunan		p	-	
16	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Permendagri 86 Tahun 2017	Tahunan		-	-	
17	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	Permendagri 86 Tahun 2017	Tahunan		-	-	
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Permendagri 86 Tahun 2017 / RKP 2022	Tahunan		p	p	
19	Data Jumlah Keterwakilan Perempuan di Legislatif	RPJMN, RKP	5 Tahunan		p		
20	Persentase Kabupaten Layak Anak	RKPD	Tahunan		-	p	
21	Indeks Perlindungan Anak	Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMN 2020- 2024, RKP 2022	Semesteran		-	p	
22	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Permendagri 18 Tahun 2020 / TPB-SDGs	Tahunan		-	-	
23	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	RKPD	Tahunan		p	p	
B.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Permendagri 86/2017	Tahunan		p	p	
2	Total Fertility Rate (TFR)	Permendagri 86/2017	Tahunan		p	p	
3	Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun	Permendagri 86 2017 / RKP Tahun 2022	5 Tahunan		p	p	
4	Age Specific Fertility Rate/ASFR (Jumlah Kelahiran per-1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun)	Permendagri 18 Tahun 2020 / TPB-SDGs	Tahunan		p	p	
5	Indeks pembangunan kualitas keluarga	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		p	p	
5	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender	Permendagri 18 Tahun 2020 / TPB-SDGs	Tahunan		-	-	

6	Proporsi Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun	Kepmen No. Kep. 140/M.PPN/HK/10/2021	Tahunan		p	p	
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Permendagri 18 Tahun 2020 / TPB-SDGs	Tahunan		p	p	
8	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIKKRR)	RKPD	Tahunan		p	p	
9	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Permendagri 86 Tahun 2017	Tahunan		-	-	
10	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Permendagri 86/2017,TPB	Tahunan		-	-	
12	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Permendagri 86/2017,TPB	Tahunan		-	-	
1.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten	Permen LHK 27/21, 1. RPJPN;2. RPJPD;3. RPKMN;4.RKPD 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021	Tahunan		p	p	
2	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		p	p	
3	Peningkatan Indeks Kualitas Air di Kabupaten	Permen LHK 27/21, Rencana Kerja Pemerintah 2022, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Tahunan		p	p	
4	Peningkatan Indeks Kualitas Udara di	Permen LHK 27/21, Rencana	Tahunan		p	p	

	Kabupaten	Kerja Pemerintah 2022, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs					
5	Peningkatan Indeks Tutupan Hutan/Lahan di Kabupaten	Permen LHK 27/21, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Tahunan		p	p	
6	Ketersediaan Laporan Inventaris GRK dan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Permendagri 86/17	Tahunan		-	-	
7	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Permendagri 86/17	Tahunan		-	p	
8	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/ Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	Permendagri 86/17	Tahunan		-	p	
9	Jumlah Pelatihan Yang Diberikan Kepada Lembaga Kemasyarakatan	Permendagri 86/17	Tahunan		-	-	
10	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Permendagri 86/17	Tahunan		-	-	
11	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup Yang Ditangani	Permendagri 86/17	Tahunan		p	-	
12	Persentase Sampah Yang Tertangani	Permendagri 86/17	Tahunan		-	p	
13	Presentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	TPB, RKPD			-	-	
14	Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup	RKPD	Tahunan		-	p	
15	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	RKPD	Tahunan		-	p	
16	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif dan Tahunan)	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		-	p	

17	Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah (Juta TON)	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	
18	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	
	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penih pengumpulan sampah	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan			p	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Skala 1: 50.000-1:500.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
1.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Jumlah Pemerintahan Desa	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
2	Persentase Bangunan Pemerintah Desa dalam Kondisi Baik	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
3	Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
4	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
6	Jumlah Posyandu di Kabupaten	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
7	Presentase Posyandu Aktif	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
8	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
9	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
10	Rekapitulasi Data Kawasan Perdesaan	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
11	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Indeks Desa Membangun	Tahunan		-	p	

12	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Indeks Desa Membangun	Tahunan		-	p	
13	Persentase Desa yang Aktif Melakukan Kerjasama Desa	Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023	Tahunan		-	-	
14	Persentase LPM Berprestasi	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
15	Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten	Kemendes	Tahunan		p	p	
16	Jumlah Desa Tertinggal	Indeks Desa Membangun/TPB-SDGs	Tahunan		P	P	
17	Jumlah Desa Berkembang	Indeks Desa Membangun/TPB-SDGs	Tahunan		P	P	
18	Jumlah Desa Mandiri	Indeks Desa Membangun	Tahunan		P	P	
19	Jumlah Desa Maju	Indeks Desa Membangun	Tahunan		P	P	
20	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional Yang Terlatih	PRODESKEKEL	Tahunan		-	P	
21	Jumlah Desa Yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	PRODESKEKEL	Tahunan		-	P	
22	Jumlah Desa Yang Telah Memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa Sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasaan Batas Desa yang Ditetapan Dalam Peraturan Bupati / Walikota	PRODESKEKEL	Tahunan		-	P	
23	Jumlah Kabupaten yang Melakukan Konvergensi Pencegahan Stunting Di Desa	SIPD-E.Database	Tahunan		P	P	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Sebaran Desa Tertinggal Masyarakat dan Desa	Pepres No.23 Tahun 2021			-	-	

2	Peta Sebaran Desa Mandiri	Pepres No.23 Tahun 2021			-	-	
3	Peta Sebaran Desa Berkembang	Pepres No.23 Tahun 2021			-	-	
4	Peta Sebaran Administrasi Desa/Desa Adat dan Peta Batas Adminstrasi Kleurahan Minimal skala 1:10.000	Pepres No.23 Tahun 2021			-	-	
1.	DINAS PERHUBUNGAN						
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	RKPD	Tahunan		-	p	
2	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	RKPD	Tahunan		-	p	
3	Persentase Potensi Titik Parkir yang di Tangani	RKPD	Tahunan		-	p	
4	Jumlah Terminal Menurut Kabupaten dan Tipe Terminal di Kabupaten	Permendagri 86 thn 2017	Tahunan		-	p	
5	Jumlah Pelabuhan di Kabupaten	Tujuan Pembangunan/Berkelanjutan/SDGs	Tahunan		-	p	
6	Jumlah Dermaga Penyeberangan.	Permendagri 86 thn 2017	Tahunan		-	p	
7	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Yang Masuk/Keluar Daerah di Kabupaten	Tujuan Pembangunan/Berkelanjutan/SDGs	Tahunan		-	-	
8	Jumlah Barang Melalui Dermaga di Kabupaten	Tujuan Pembangunan/Berkelanjutan/SDGs	Bulanan		-	-	
9	Jumlah Arus Angkutan Umum di Kabupaten (Unit)	Permendagri 86/2017	Bulanan		-	-	
10	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Darat di Kabupaten (Unit)				-	-	
11	Rasio Konektivitas Kabupaten	Permendagri.18/20,	Tahunan		-	p	

		RPD/RKPD					
12	Persentase Layanan Angkutan Darat	RPD/RKPD	Tahunan		-	-	
13	V/C Rasio di Jalan Kabupaten	Permendagri.18/20/RK PD/RPD/RKPD	2 Tahunan		-	-	
14	Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
15	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Permendagri 86 thn 2017	Tahunan		-	-	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Daerah Lingkungan dan Kerja Lingkungan Kepentingan Pelabuhan skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
2	Peta Sebaran Pelabuhan Umum Skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
3	Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan Skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
4	Peta Terminal Angkutan Umum Skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
1.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						
1	Indeks Pembangunan Statistik	BPS Nomor 3 Tahun 2022	Tahunan		-	P	
2	Indeks Masyarakat Digital	RPJPN, RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		P	P	
3	Ketersediaan Buku Data Statistik Sektoral	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Tahunan		-	P	
4	Jumlah Rekomendasi Statistik Sektoral	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Tahunan		-	-	
5	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan Rekomendasi Statistik Sektoral	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Tahunan		-	-	
6	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Tahunan		-	P	
7	Jumlah Dataset Statistik Sektoral yang di	Permendagri 18 tahun 2020	Tahunan		-	P	

	Publikasikan Menurut Organisasi Perangkat Daerah						
8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Permendagri 18 tahun 2020	Tahunan		-	P	
9	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Permendagri 18 tahun 2020	Tahunan		-	P	
10	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 18 tahun 2020	Tahunan		-	P	
11	Indeks Cyber Security Maturity (CSM) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 18 tahun 2020	Tahunan		-	P	
12	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Permendagri 18 tahun 2020	Tahunan		-	-	
13	Jumlah CSIRT(Cyber Security Incident Response Team) yang dibentuk di Sektor Pemerintah	e-database sipd	Tahunan		-	-	
14	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi jaringan Intra Pemerintah	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020	Tahunan		-	-	
15	Jumlah Aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 18 tahun 2020	Tahunan		-	-	
16	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki portal Lingkup Pemerintah	Permendagri 18 tahun 2020	Tahunan		-	-	
17	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Website	Permendagri 18 tahun 2020	Tahunan		-	-	
18	Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 18 tahun 2020, RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		p	p	

19	Jumlah Layanan Internet Desa	Perpres RI No. 95 Tahun 2018	Tahunan		-	-	
20	Jumlah Kemitraan Media Menurut Jenis Media	Perpres RI No. 76 Tahun 2013	Tahunan		-	-	
21	Persentase Cakupan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat	Permendagri 18 tahun 2020	Tahunan		-	-	
22	Presentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/mereplikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	permendagri 18 tahun 2020	Tahunan		-	P	
23	Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang Terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan		-	-	
24	Persentase layanan publik dan Layanan administrasi yang memanfaatkan sertifikat elektronik	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan		-	-	
25	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan		-	-	
26	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah counter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap Pemerintah daerah yang di desiminasikan sesuai dengan strategi komunikasi	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan		-	-	
27	Persentase informasi publik yang disediakan dan di umumkan oleh pemerintah daerah sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan		-	-	
28	Persentase perangkat Daerah yang	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan		-	-	

	menggunakan layanan pusat data (Portal Satu Data) Kabupaten Mamuju Tengah						
29	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE dan CSIRT	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan		-	-	
30	Persentase (%) Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan		-	-	
31	Persentase tingkat kepuasan penggunaan jaringan internet yang disediakan oleh Kominfo	-	Tahunan		-	-	
32	Aplikasi yang didaftarkan / diluncurkan	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan		-	-	
33	Aplikasi yang dipakai / diimplementasikan	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan		-	-	
1.	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA						
A.	Urusan Transmigrasi						
1	Persentase Jumlah Transmigran dari Penduduk Setempat	PP No. 3 Tahun 2014	Tahunan		-	p	
2	Jumlah Kawasan Transmigrasi	PP No. 3 Tahun 2014	Tahunan		-	p	
3	Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB	PP No. 3 Tahun 2014	Triwulanan		-	p	
4	Persentase Kawasan Transmigrasi Mandiri	PP No. 3 Tahun 2014	Tahunan		-	p	
7	Data Pengembangan BUM Desa Bersama di Kawasan Transmigrasi	Perpres No. 2 Tahun 2022	Tahunan		p	-	
8	Data Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Kepmendesa PDTT No. 40 Tahun 2021, Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2021, Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020, Permendagri No. 20 Tahun 2018	Tahunan		p	-	
9	Data calon transmigrasi yang telah	PP No. 3 Tahun 2014	Tahunan		p	-	

	difasilitasi pelatihan dan sertifikat						
10	Persentase Transmigran Swakarsa	PP No. 3 Tahun 2014	Tahunan		-	-	
B.	Urusan Tenaga Kerja						
1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin	1. Permenaker No. 39 Tahun 2016; 2. Permenaker No. 11 Tahun 2021	Triwulanan		p	p	
2	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin	1. Permenaker No. 39 Tahun 2016; 2. Permenaker No. 11 Tahun 2021	Triwulanan		p	p	
3	Besaran Upah Minimum	Permennaker No.18/22	Tahunan		-	-	
4	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Permennaker No.18/22	Tahunan		-	p	
5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Permennaker No.18/22	Tahunan		-	-	
6	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Permennaker No.18/22	Tahunan		-	-	
7	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	Permennaker No.18/22	Tahunan		-	p	
8	Besaran Pemagangan yang Terdaftar dan yang Ditempatkan	RKP.2022	Tahunan		p	p	
9	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Keselamatan dan Perlindungan K3	RKP.2022	Tahunan		-	p	
10	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Per-Tahun	Permennaker No.18/22	Tahunan		-	-	
11	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	Permennaker No.18/22	Tahunan		-	-	
12	Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	Permennaker No.18/22	Tahunan		-	-	
13	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan	Permennaker No.18/22	Triwulanan		p	p	
15	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
16	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	

	(dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
17	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi	Permendagri 18/20, RKPD	Tahunan		p	p	
18	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bpartitn Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketengakerjaan	Permendagri 18/20, RKPD	Tahunan		-	-	
19	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan	Permendagri 18/20, RKPD	Tahunan		-	p	
20	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kabupaten	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		p	p	
21	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		p	p	
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		p	p	
23	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan				
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan				
2	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.0	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan				
1.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Juta)	Permendagri 86/2017	Triwulanan		-	p	
2	Pertumbuhan investasi daerah	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan			p	
3	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Permendagri 86/2017	Triwulanan		-	p	

4	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Permendagri 86/2017	Triwulanan		-	p	
5	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Juta Rupiah)	Permendagri 86/2017	Triwulanan		-	p	
6	Jumlah Izin Lokasi yang Diterbitkan Tepat Waktu	Permendagri 86/2017	Triwulanan		-	p	
7	Jumlah Investor	Permendagri 86/2017	Triwulanan		-	p	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Permenpan No 14/2017	Semester		-	-	
9	Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal	BKPM No 8 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
10	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Perka BKPM No 3 Tahun 2021	Semester		-	-	
1.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
A.	Urusan Perpustakaan						
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Permendagri 18/20, RKP 2022, PP 13/ 2019	Tahunan		p	p	
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	SIPD E-Database			p	p	
3	Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah	RKPD 2023	Tahunan		-	p	
4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Permendagri 86 / 17	Tahunan		-	p	
5	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia	Permendagri 86 / 17	Tahunan		-	p	
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	Permendagri 86 / 17	Tahunan		-	-	
7	Jumlah Taman Baca/dan Perpustakaan Desa	SIPD E-Database	Tahunan		-	-	
8	Jumlah Komunitas Penggiat Literasi	SIPD E-Database	Tahunan		-	-	
B.	Urusan Kearsipan						
1	Jumlah Arsip Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	Permendagri 86 / 17	Triwulanan		-	p	

2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Permendagri 86 / 17	Tahunan		-	p	
3	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Permendagri 86 / 17	Tahunan		-	-	
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menerapkan E-Arsip Terintegrasi	SIPD E-Database	Tahunan		-	p	
5	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan Yang Ditindaklanjuti	SIPD E-Database	Tahunan		-	-	
6	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	SIPD E-Database	Tahunan		-	-	
7	Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	SIPD E-Database	Tahunan		-	-	
PETA GEOSPASIAL							
1	Peta Lokasi Perpustakaan Daerah skala 1:5.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan				
2	Peta Sebaran Taman Baca dan Perpustakaan Desa skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan				
1.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
A.	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
1	Jumlah Koperasi Menurut Status Keaktifan	Permendagri 86/2017	Tahunan		p	p	
2	Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota						
3	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Kategori Usaha dan Surat Izin Usaha	Permendagri 86/2017	Tahunan		p	p	
4	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Permendagri 18/21	Tahunan		-	-	
5	Proporsi UKM Menjalani Kemitraan dan Ekspor	Permendagri 18/21	Tahunan		-	-	
6	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/ Kota	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan				

7	Jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap						
8	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Permendagri 18/21	Tahunan		-	-	
9	Persentase Pertumbuhan Wirsausaha	Permendagri 18/21	Permendagri 18/21		-	-	
B.	Urusan Perdagangan				-	-	
1	Persentase koefisien variasi harga antar waktu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan			p	
2	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
3	Ekspor Barang dan Jasa	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan				
3	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	
4	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Pelatihan/Pengembangan Produk	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
6	Tertib Usaha	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	
7	Persentase kinerja realisasi pupuk	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	
8	Persentase Stabilitas dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
9	Penanganan Inflasi Pangan Bergejolak	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	
C.	Urusan Perindustrian				-	-	
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengeolahan Nonmigas	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Permendagri 18/20	Permendagri 18/20		-	-	
4	Persentase pencapaian sasaran	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	

	pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP						
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	
8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	
9	Bantuan terhadap Kelompok UMKM untuk Pengembangan Kewirausahaan	-	Tahunan		-	-	
10	Data Bantuan Kelompok IKM	-	Tahunan		-	-	
11	Data Bantuan Kelompok Usaha Perdagangan	-	Tahunan		-	-	
12	Jumlah UMKM yang go-digital	-	Tahunan		-	-	
13	Rasio PDRB industri pengolahan	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		p	p	
					-	p	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
2	Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	

	Industri skala 1:50.000						
3	Peta Lokasi Kegiatan Logistik dan Pergudangan skala 1 : 50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
4	Peta Sebaran Pasar Rakyat dan Pasar Desa skala 1 : 50.000 - 1 : 5.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
5	Peta Sebaran Pasar Induk, Terminal, Agribisnis, Pasar Komoditi dan Pusat Distribusi Regional Skala 1 : 50.000- 1 : 5.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
6	Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), minimal pada skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
7	Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
8	Peta Lokasi Koperasi Binaan skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
9	Peta Lokasi UMKM Binaan berdasarkan cluster usaha Skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan		-	-	
1.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
A.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						
1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
2	Jumlah Wirausaha Muda	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
3	Jumlah Pelatih Yang Bersertifikat	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
4	Indeks Pembangunan Kepemudaan	SIPD-Edatabase	Tahunan		p	-	
5	Jumlah Atlet Berprestasi	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
6	Tingkat Prestasi Olahraga	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
7	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
8	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
9	Persentase Pengembangan Daya Saing	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	

	Keolahragaan						
10	Jumlah Lembaga Pramuka yang Aktif	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
B.	Urusan Pariwisata						
1	Persentase Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	RKPD			-	p	
2	Persentase Kontribusi Pariwisata terhadap PAD	SIPD-Edatabase			-	p	
3	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	SIPD-Edatabase			-	p	
4	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Mamuju Tengah	RKPD, TPB, PDB, Tourism Satellite Account (TSA)			-	p	
5	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	RKPD, TPB, PDB, Tourism Satellite Account (TSA)			-	p	
6	Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Mamuju Tengah	SIDs			-	p	
7	Jumlah Destinasi Pariwisata Unggulan	SIDs			-	p	
8	Jumlah Hotel/Penginapan	SIDs			-	-	
9	Jumlah Rumah Makan/Restoran	SIDs			-	-	
10	Rasio PDRB penyediaan akomodasi Makan dan Minum	RPJPD, RPJMD, RKPD				p	
11	Jumlah industri ekonomi kreatif di Kabupaten	RPJPD, RPJMD, RKPD				p	
12	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Legalitas Usaha	RKPD			-	-	
13	Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya	RKPD			-	p	
14	Jumlah pelaksanaan event pariwisata kabupaten dalam setahun	RKPD			-	-	
1.	DINAS PERIKANAN						
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Permen KKP No. 57/20	Tahunan		p	p	

2	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Permen KKP No. 57/20	Tahunan		p	p	
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Permen KKP No. 57/20	Tahunan		p	p	
4	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Permen KKP No. 57/20	Tahunan		p	p	
5	Jumlah Produksi Budidaya Rumput Laut	Permen KKP No. 57/20	Tahunan		p	-	
6	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn),	Permen KKP No. 57/20	Tahunan		-	-	
7	Jumlah Kapal dan Perahu (Unit)	Permen KKP No. 57/20	Tahunan		-	-	
8	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
9	Jumlah Nelayan Yang Terlindungi	UU. No.7 Tahun 2016	Tahunan		-	-	
10	Rata-Rata Pendapatan Nelayan	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
11	Pendapatan Pembudidaya Ikan	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
12	Klasifikasi Jenis Ikan	Kepmen KKP No. 37 Tahun 2021	5 Tahunan		-	-	
13	Klasifikasi Alat Penangkapan Ikan	Kepmen KKP No. 89 Tahun 2021	5 Tahunan		-	-	
14	Klasifikasi Obat Ikan	Permen KKP No. 1 Tahun 2019	5 Tahunan		-	-	
15	Klasifikasi Penyakit Ikan	Permen KKP No. 13 Tahun 2021	5 Tahunan		-	-	
16	Klasifikasi Harga Ikan	Permen KKP No. 57 Tahun 2020	Mingguan		-	-	
17	Luas Kawasan Konservasi	Permen KKP No. 31 Tahun 2020 dan Perda No. 6 Tahun 2017	5 Tahunan		-	-	
18	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
19	Jumlah Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
20	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	Permen KKP No. 42 Tahun 2019	5 Tahunan		-	-	
21	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	

	perundangan yang berlaku						
22	Nilai Tukar Produk Hasil Perikanan (NTPHP)	Permen KKP No. 57 Tahun 2020	Tahunan		-	-	
23	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Dibina Dalam Membantu Pengawasan SDKP	Kepmen KKP No. 58/KEPMEN-KP/2001	Tahunan		-	-	
24	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan Yang Diterbitkan Bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
25	Perizinan Usaha Penangkapan Ikan dan Kapal Perikanan	Permen KKP No. 58 Tahun 2020	Tahunan		-	-	
26	Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, Desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan	RKPD 2023			-	-	
27	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Daerah Irigasi Tambak skala 1 : 5.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan	Desembe r			
2	Peta Potensi Wilayah Penangkapan Ikan skala 1:250.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan	Desembe r			
3	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Skala 1:250.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan	Desembe r			
4	Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan	Desembe r			
1.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						
1	Indeks Ketahanan Pangan	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		p	p	
2	Produksi Komoditas Pangan	BPS, Dinas Pertanian	Tahunan		-	-	
3	Ketersediaan dan Rata Rata Konsumsi Energi dan Protein	Permendagri 86 Tahun 2017	Tahunan		-	p	

4	Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Makanan	Rkpd,Kepmen PPN Nomor Kep.140/M.PPN/HK/10/2022	Tahunan		-	p	
5	Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Non Makanan	Rkpd,Kepmen PPN Nomor Kep.140/M.PPN/HK/10/2022	Tahunan		-	p	
6	Persentase Cadangan Pangan Kabupaten	RPD 2022, Kepmen PPN Nomor Kep.140/M.PPN/HK/10/2022	Mingguan		-	p	
7	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	RPD, Permendagri 86 Tahun 2017	Tahunan		-	p	
8	Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan	RPD, Permendagri 86 Tahun 2017 RPD, Perpres No. 66 Tahun 2021, Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022, Permendagri 86 Tahun 2017	Tahunan		-	-	
9	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, Perpres No. 66 Tahun 2021, Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022, Kepmen PPN Nomor Kep.140/M.PPN/HK/10/2022	Tahunan		-	p	
10	Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal	RPD	Tahunan		-	-	
11	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Rencana Kerja Pemerintah 2022, Kepmen PPN Nomor Kep.140/M.PPN/HK/10/2022	Tahunan		-	-	
12	Angka Kecukupan Protein (AKP)	RKPD, Kepmen PPN Nomor Kep.140/M.PPN/HK/10/2022	Tahunan		-	-	
13	Penguatan Cadangan Pangan	RKPD ,Perpres No. 66 Tahun	Tahunan		-	p	

		2021, Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022					
14	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	UU No. 18 tahun 2012 pasal 114 tentang pangan, PP No.17 Tahun 2015 Pasal 75 dan 82 tentang ketahanan pangan dan gizi, Permendagri No. 86 Tahun 2017	Tahunan		-	p	
15	Lumbung Pangan Masyarakat	RKPD, Perpres No. 66 Tahun 2021, Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022	Tahunan		-	-	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Kerawanan Pangan	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan	Desember			
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
1	Populasi Ternak dan Jenis Ternak	Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40 Th. 2021	Tahunan	Januari	-	p	
2	Populasi Unggas dan Jenis Unggas (ekor)	Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40 Th. 2021	Tahunan	Januari	-	p	
3	Produksi Daging Ternak dan Jenis Ternak (kg)	Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40 Th. 2021	Tahunan	Januari	-	-	
4	Produksi Telur Unggas dan Jenis Unggas (Kg)	Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40 Th. 2021	Tahunan	Januari	-	-	
5	Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi dan Jenis Unggas (Kg)	Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40 Th. 2021	Tahunan	Januari	-	-	
6	Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi di Kabupaten Mamuju Tengah	Kepmen PPN no. 140 tahun 2022	Tahunan	Januari	p	p	
7	Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Jagung di Kabupaten Mamuju Tengah	Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40 Th. 2021	Tahunan	Januari	-	p	
8	Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Komoditas Sayuran	Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40 Th. 2021	Tahunan	Januari	-	-	
9	Luas Panen, Produksi dan Produktifitas	Peraturan Menteri	Tahunan	Januari	-	-	

	Komoditas Biofarmaka	Pertanian RI No. 40 Th. 2021					
10	Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Komoditas Buah-Buahan	Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40 Th. 2021	Tahunan	Januari	-	-	
11	PDRB ADBH Dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	RKPD	Tahunan	Januari	-	p	
12	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB Atas Dasar hHarga Konstan (Hk)	SIPD.E-Database	Tahunan	Februari	-	p	
13	Luas lahan Sawah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Mamuju Tengah	RKPD	Tahunan	Januari	-	-	
14	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian	RKPD	Tahunan	Maret	-	p	
15	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	RKPD	Tahunan	Maret	-	p	
16	Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan	RKPD	Tahunan	Maret	-	p	
17	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RKPD	Tahunan	Maret	-	p	
18	Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Pertanian	RKPD	Tahunan	Maret	-	p	
19	Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Koorporasi dan Kawasan Pertanian Strategis	RKPD	Tahunan	Maret	-	p	
20	Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP (Good Agricultural	RKPD	Tahunan	Maret	-	p	

	Practice) dan GHP (Good Handling Practice)						
21	Jumlah Kelompok Petani	SIPD.E-Database	Tahunan	Januari	-	p	
22	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian	SIPD.E-Database	Tahunan	Januari	-	p	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Lahan Sawah yang dilindungi minimal skala 1:5.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan	Desember			
2	Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan Skala 1 : 50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan	Desember			
3	Peta Lahan Pertanian Hortikultura Skala 1 : 50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan	Desember			
4	Peta Lahan Peternakan Skala 1 : 50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan	Desember			
Perkebunan							
1	Luas Areal Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman (ha),	Permendagri 86/17	Tahunan	Agustus	p	-	
2	Luas Tanaman Perkebunan yang Menghasilkan dan Jenis Tanaman (ha),	Permendagri 86/17	Tahunan	Agustus	p	-	
2	Jumlah Produksi Perkebunan dan Jenis Tanaman (ton),	Permendagri 86/17	Tahunan	Agustus	p	-	
3	Jumlah Produktivitas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman (Kg/Ha/Thn),	Permendagri 86/17	Tahunan	Agustus	p	-	
3	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pemilik Lahan Perkebunan dan Jenis Tanaman	Permendagri 86/17	Tahunan	Agustus	p	-	
4	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB	Permendagri 86/17	Tahunan	Februari	p	-	
4	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	RKPD	Tahunan	Maret	-	-	
5	Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan	RKPD	Tahunan	Maret	-	-	
5	Persentase Penerapan GAP dan GHP dan	RKPD	Tahunan	Maret	-	-	

	GMP Tanaman Perkebunan						
6	Jumlah Petani Perkebunan Rakyat yang Memiliki STDB di beberapa kabupaten untuk 16 komoditas utama perkebunan (Sawit)	RPJMN 2020-2024, No. 1 Tahun 2021	Tahunan	Maret	p	-	
DATA GEOSPASIAL							
1	Peta Lahan Perkebunan Skala 1 : 50.000	Pepres No.23 Tahun 2021	Tahunan	Desember			
1.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	Ketersediaan Dokumen Perencanaan	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
2	Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
3	Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
4	Persentase Program/ Kegiatan yang Tidak Terlaksana Pada Pemerintah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
5	Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam	RKPD	Tahunan		-	p	
6	Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	RKPD	Tahunan		-	p	
7	Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	RKPD	Tahunan		-	p	
8	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Permendagri 17/2016	Tahunan		-	p	
9	Indeks Inovasi	Permendagri 104/2018, RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		-	p	
10	Jumlah Inovasi Daerah	PP 38/2018	Tahunan		-	p	
11	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan	Permendagri 17/2016	Tahunan		-	p	
12	Persentase Evaluasi Inovasi yang	RKPD	Tahunan		-	p	

	Berkelanjutan						
13	Indeks Kapabilitas Inovasi						
1.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAN						
A.	Urusan Kepegawaian						
1	Indeks Profesionalitas ASN	Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019	Tahunan		-	p	
2	Indeks Sistem Merit ASN	Permenpan no 40 tahun 2018	Tahunan		-	p	
3	Indeks Kepuasan ASN	Permenpan Nomor 14 Tahun 2017	Tahunan		-	-	
4	Jumlah PNS Yang Dikenai Sanksi/ Melakukan Pelanggaran Disiplin PNS Lingkup di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020	Tahunan		-	p	
5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju Tengah	Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020	Tahunan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Fungsional Umum	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Fungsional Tertentu	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon IV	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon III	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon II	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon I	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di	Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020	Tahunan		-	p	

	Kabupaten Mamuju Tengah						
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berpendidikan Terakhir SMA/SMK/MA/Sederajat	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berpendidikan Terakhir D.III	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berpendidikan Terakhir Strata-1/D.IV	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berpendidikan Terakhir Strata-2	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berpendidikan Terakhir Strata-3	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju Tengah	Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020	Tahunan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda Tingkat I	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru Tingkat I	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Muda	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Muda Tingkat I	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	

	Tingkat Kepangkatan Pengatur						
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Tingkat I	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Penata Muda	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Penata Muda Tingkat I	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Penata	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Penata Tingkat I	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Tingkat I	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama Muda	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama	SIPD.E-Database	Triwulanan		-	p	
8	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin ddi Kabupaten Mamuju Tengah	Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020	Tahunan		-	p	
9	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
10	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
B.	Urusan Pendidikan dan Pelatihan						
1	Persentase PNS Yang Mengikuti Pendidikan Formal Lingkup Pemerintah di Kabupaten	Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020	Tahunan		-	p	

	Mamuju Tengah						
2	Jumlah Peserta dan Jam Pelajaran Menurut Jenis Pengembangan Kompetensi di Kabupaten Mamuju Tengah	PP No.11 thn 2017, Permendagri No 108 thn 2017, RKPD	Tahunan		-	p	
3	Jumlah Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pelatihan Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	PP No.11 thn 2017, Permendagri No 108 thn 2017, RKPD	Tahunan		-	p	
4	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural,	PP No.11 thn 2017, Permendagri No 108 thn 2017	Tahunan		-	p	
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
1.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH						
1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
2	Jumlah APBD dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
3	Jumlah Pendapatan Menurut Kabupaten di Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
4	Rincian Belanja APBD Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
5	Persentase SILPA Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
6	Persentase Belanja Pendidikan (20%) dan Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
7	Persentase Belanja Pengawasan (1%) Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 15/2024	Tahunan		-	p	

8	Bagi Hasil Kabupaten/ Kota/ Desa Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	-	
9	Jumlah Total Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri No. 19/2016	Tahunan		-	p	
10	Penetapan APBD Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
11	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
12	Rasio Pendapatan Asli Daerah	Permendagri 18/20	Tahunan		-	p	
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan			p	
14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Tahunan		-	p	
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	-	Tahunan		-	p	
16	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-	Tahunan		-	p	
17	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	
18	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Permendagri 18/20	Tahunan		-	-	
19	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	UU Nomor 59 Tahun 2024	Tahunan		p	-	
1.	SEKRETARIAT DPRD						
1	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju Tengah	UU Nomor 17 Tahun 2014	Triwulanan		-	-	
2	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Menurut Partai dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah	UU Nomor 17 Tahun 2014	Triwulanan		-	-	
3	Jumlah Keputusan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Jenis Keputusan	UU Nomor 17 Tahun 2014	Triwulanan		-	-	

	di Kabupaten Mamuju Tengah						
4	Ketersediaan Dokumen Rencana Kerja DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Triwulanan		-	-	
5	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan			p	
6	Tingkat Kepuasan Layanan terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RKPD	Tahunan		-	-	
7	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) dan Dokumen Rencana Tahunana (RPKD)	RKPD	Tahunan		-	P	
8	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	RKPD	Tahunan		-	P	
1.	INSPEKTORAT						
1	Jumlah Temuan BPK-RI	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPKP	Permendagri 86/2017	Tahunan		-	p	
4	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat	RKPD	Tahunan		-	p	
5	Jumlah Fungsional Pengawas Menurut Jenjang Jabatan	RKPD	Tahunan		-	p	
6	Level Kapabilitas APIP	RKPD/BPKP	Tahunan		-	p	
7	Indeks Maturitas SPIP	BPKP, RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		-	p	
8	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	RKPD	Tahunan		-	p	

	Instansi Pemerintah (SAKIP)						
9	Tingkat Kepatuhan LHKPN	KPK	Tahunan		-	p	
10	Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP KORSUPGAH)	Permendagri 18/20, RPJPD	Tahunan		-	p	
11	Persentase Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti	RKPD	Tahunan		-	p	
12	Persentase Temuan Penyimpangan Terhadap APBD	RKPD	Tahunan		-	-	
13	Indeks Survey Penilaian Integritas	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan			p	
1.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1	Jumlah Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Kabupaten Mamuju Tengah	PMDN 57/17	Tahunan		-	p	
2	Jumlah Partai Politik (PARPOL) Kabupaten Mamuju Tengah	PMDN 78/20	Tahunan		-	p	
3	Jumlah Partai Politik (PARPOL) Yang Menerima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Mamuju Tengah	PMDN 78/20	Tahunan		-	p	
4	Persentase perempuan pengurus partai politik	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan			p	
5	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PMDN 11/19	Tahunan		p	p	
6	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	PMDN 11/19	Tahunan		-	p	
7	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	PMDN 11/19	Tahunan		-	p	
8	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	PMDN 11/19, PMDN 12/22 tusi Forkopimda	Tahunan		-	p	

9	Indeks Demokrasi Indonesia	PMDN 27/21	Tahunan		p	p	
10	Data Aksi Unjuk Rasa	RKPD	Tahunan		-	p	
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan			p	
A.	SEKRETARIAT DAERAH						
1. Bagian Kesejahteraan Masyarakat							
1	Jumlah Penerima Belanja Hibah Rumah Ibadah di Kabupaten Mamuju Tengah	RKPD			-	p	
2	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	RKPD			-	-	
2. Bagian Hukum dan HAM							
1	Indeks Reformasi Hukum	RPJPD, RPJMD, RKPD			p	p	
2	Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	RPJPD, RPJMD, RKPD					
3	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang diterbitkan	UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri 80 Tahun 2015, Permendagri 120 Tahun 2018, Pepres 33/12			-	p	
4	Jumlah Pembinaan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang dilakukan	UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri 80 Tahun 2015, Permendagri 120 Tahun 2018			-	p	
5	Rata-rata Lama layanan pengurusan dokumen (min, max, rata-rata)	-			-	p	
3. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam							
1	Data Inflasi	RKPD	Tahunan		-	p	
2.	Data Ekonomi Mikro		Tahunan		-	p	
3	Indeks Harga Konsumen	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan			p	
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa							
1	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Perangkat Daerah Yang Terumumkan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup)	Tahunan		-	p	

2	Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Metode Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Tahunan		-	p	
3	Data Rekap Tender Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Tahunan		-	p	
4	Realisasi Tender Menurut Jenis Pengadaan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Tahunan		-	p	
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		Tahunan		-	p	
6	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.yang ditandatangani pada kuartal pertama	Permendagri 18/20LPPD	Tahunan		-	p	
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Permendagri	Tahunan		-	p	
8	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Permendagri 18/20LPPD	Tahunan		-	p	
9	Penggunaan Komponen Dalam Negeri		Tahunan		-	p	
5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana							
1	Jumlah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah	Perda Kelembagaan	Tahunan		-	-	
2	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKJP)	LHE Permenpan RB	Tahunan		-	p	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	LHE Permenpan RB	Tahunan		p	p	
4	Indeks Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Permenpan 88 Thn 2021	Tahunan		-	p	
5	Indeks Kualitas Kelembagaan	Permendagri 99 Tahun 2018	Tahunan		-	p	
6	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 10 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP	Permenpan 88 Thn 2021/RKPD	Tahunan		-	p	
7	Indeks Pelayanan Publik	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan				
6. Bagian Umum							

1	Jumlah Pengelolaan Surat Bagian Umum	RKPD	Tahunan				
2	Jumlah Kegiatan Pimpinan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	RKPD	Tahunan		-	p	
3	Jumlah Tamu Pimpinan di Kabupaten Mamuju Tengah (Orang),	RKPD	Tahunan		-		
7.	Bagian Pemerintahan						
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	RPJMD, RKPD	Tahunan		-	p	
2	Nilai Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	RKPD	Tahunan		-	p	
3	Jumlah Kerja Sama Daerah	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan			p	
8. Bagian Administrasi Pembangunan							
1	Jumlah Pembangunan Fisik DAU				-	-	
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan							
1	Jumlah Tamu Pimpinan di Kabupaten Mamuju Tengah (Orang),				-	-	
1.	KECAMATAN						
1	Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan				
2	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbang Desa	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan				
3	Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan				
4	Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem Setiap Desa	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan				
5	Jumlah Penduduk Setiap Desa Per Kecamatan	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan				
6	Jumlah Kejadian Bencana yang Terlaporkan	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan				
7	Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan				
8	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan				

	dan Kebudayaan						
9	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	aplikasi SIPD e-Database	Tahunan				
1.	POLRES						
1	Tingkat Kriminalitas	RPJMN, RKP	Tahunan		p	p	
2	Angka Pravalensi Penyalahgunaan Narkotika	RPJMN, RKP	2 Tahunan		p		
3	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		p	p	
4	Persentase Unjuk Rasa yang Aman dan Damai	RPJPD, RPJMD, RKPD	Tahunan		p	p	

BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARSAL ARAS